

Judul : Keharusan Bermasker Dilonggarkan
Tanggal : Rabu, 18 Mei 2022
Surat Kabar : Republik
Halaman : 1

Keharusan Bermasker Dilonggarkan

Pelonggaran menjadi bagian program transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19.

■ FAUZIAH MURSID,
DIAN FATH RISALAH

JAKARTA — Berbagai aturan pengetatan termasuk keharusan bermasker bagi setiap individu kini perlahan mulai dilonggarkan seiring melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air. Pemerintah memutuskan untuk membolehkan masyarakat melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka.

"Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker," kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya secara daring, Selasa (17/5).

Namun, Presiden Jokowi mengatakan, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, masyarakat tetap wajib menggunakan masker. Jokowi juga meminta kepada masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan seperti lansia, memiliki riwayat penyakit komorbid, untuk tetap menggunakan masker.

"Saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas," ujar Jokowi.

Pemerintah juga memberi ke-

longgaran tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan. Salah satunya, kewajiban tes usap PCR maupun antigen kepada pelaku perjalanan dalam negeri maupun luar negeri yang sudah divaksinasi lengkap kini resmi ditiadakan. Artinya, masyarakat yang hendak melakukan mobilitas ke mana pun tak lagi memerlukan tes Covid-19.

"Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen," ujar Jokowi.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, salah satu pertimbangan pelonggaran penggunaan masker karena kemampuan imun orang Indonesia terhadap varian omikron baru cukup baik. Pemerintah memandang kasus Covid-19 relatif sudah terkendali.

Terlebih, lanjut Menkes, selama ini ternyata kenaikan kasus Covid-19 disebabkan adanya varian baru dan bukan karena adanya hajat besar seperti Lebaran dan tahun baru. Terbukti, saat ini terjadi lonjakan kasus di AS, Jepang, Taiwan, dan Cina karena subvarian BA2 omikron.

"Yang menarik di Indonesia dan India BA2 sudah dominan. Beda dengan Cina dan AS, kita tak mengamati kenaikan kasus yang tinggi. Jadi, relatif Indonesia dan India imunnya terhadap varian baru cukup baik," kata Menkes Budi.

“

Pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah divaksinasi dosis lengkap tidak perlu tes PCR maupun antigen.

Joko Widodo
Presiden

Budi menjelaskan, 93 persen masyarakat Jawa dan Bali telah terbentuk antibodi yang berasal dari infeksi atau vaksinasi berdasarkan survei yang dilakukan Kemenkes pada Desember 2021. Kemudian, sebelum mudik Lebaran atau pada Maret 2022, kembali dilakukan survei dan hasilnya 99,2 persen masyarakat Jawa dan Bali telah memiliki antibodi.

Namun, tidak hanya jumlah masyarakat yang memiliki antibodi lebih banyak, tetapi kadar antibodi yang lebih tinggi. "Pada Desember 2021, disebutkan rata-rata kadar antibodi mencapai 500-600. Kemudian, pada Maret 2021, kadar tersebut meningkat hingga 7.000-8.000," ujar dia.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pelonggaran pemakaian masker juga menjadi bagian dari program transisi

dari pandemi Covid-19 menjadi endemi di Indonesia. Namun, ia juga tetap mengimbau masyarakat tetap berperilaku hidup sehat.

"Transisi itu, selain dari data saintifik, adalah pemahaman masyarakat bahwa tanggung jawab kesehatan ada di diri masing-masing. Sekuat apa pun negara mencoba mengatur masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, lebih baik kesadaran itu ada di masing-masing individu," ujar Budi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Luqman Hakim, menyambut baik keputusan pemerintah melonggarkan pemakaian masker di tempat terbuka. Politikus PKB tersebut mendukung pemerintah yang secara bertahap melakukan normalisasi kehidupan masyarakat dari pandemi Covid-19.

Menurut dia, pencabutan secara bertahap kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat seiring makin terkendalinya pandemi Covid-19, adalah bukti pemerintah memiliki perencanaan matang, tidak buru-buru, dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat.

"Keputusan ini menunjukkan keberhasilan penanganan atas pandemi Covid-19. Keberhasilan ini juga berkat peran aktif masyarakat yang secara umum mematuhi berbagai kebijakan pengendalian Covid-19," ujar Luqman.

■ febrianto adi sapaturo ed: mas alamit huda

Baca juga
di republika.id
Pindai QR Code ini

